

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. (2015). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi 1, Cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. (2017). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andy Hartanto. (2017). *Pemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justisia, hlm. 13.
- Bahder Johan Nasution(2008), *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mondar Maju, Bandung.
- Bambang Daru Nugroho. (2018). *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Wulansari, (2016), *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Dyah Ayu Silviana, Endang Sri Santi, Triyono. (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Dibuat di bawah Tangan oleh PT.Cisadane Perdana Kota Depok*.
- Hadikusuma, H. (1994). *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 1*. Jakarta: Djambatan.

- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman rai Asmara Putra. (2018). *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- I Ketut Oka Setiawan. (2017). *Hukum Perkiatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Kertadi, I. K., & Putra, I. D. (2016). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan dalam Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Miru, A. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Perangin, E. (2002). *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Perangin, E. (1997). *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2015). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Putra, I. B. (2017). *Hukum Kontrak Internasional The Law of International Contrat, Cet. 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Rubaie, A. (2017). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Santoso, U. (2015). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Ed. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiady, T. (2018). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, S. S. (2020). *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suketi. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Ed.1*. Depok: Rajawali Pers.
- Supriadi. (2015). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. (2017). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2019). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Asiva Noor Rachmayani. “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Lapangan Dalam Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepemilikan Atas Tanah Pada Peradilan Umum,” 2015, 6. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/2038>.
- Asmi, Nur, and Ashar Sinilele. “Keabsahan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Yang Dilakukan Di Depan Kepala Desa.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (1970): 150–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15367>.

Ayuningtyas, Tri Retno, Nisfu Laila, Indah Septiana, Adellia Sallwa, and Baqa Rizki.

“Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Negara” 6, no. 4 (2024): 11766–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Hendrawati. “Analisis Yuridis Tentang Akta Jual Beli Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997.” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 9 (2017): 76–84.

Irfan, Emir Syarif, and Fatahillah Pakpahan. “Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Bukti Kuitansi (Studi Kasus Putusan Nomor 412 / Pdt .” *Rectum* 6, no. 2 (2024): 266–75.

Limbong, Ferry Susanto. “Penyebab Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Kuhp Dan Undang-Undang Pokok Agraria.” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 943–51. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3203>.

Lumalente, Sukardi. “Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017): 5–14.

Putra, Arjuna Purama, and Febrianus Adi Nggala. “Proses Perjanjian Jual Beli Hak Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 169–75.

Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, and Putu Eka Trisna Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 2 (2023): 95–102. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>.

- Yahya, Taufik. “Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari” 1 (2020): 202–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.8923>.
- Yora Selia Permono, Wreda Danang Widoyoka. “Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli Di Bawah Tangan Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kota Surabaya.” *Judiciary : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 64–86.
- Yusra, Dhoni. “Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, Dan Implikasinya Bagi Yang Menyerobot Tanah.” *Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan Dalam Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Penelitian Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2017/2018*, 2018, 23. [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9809-16\\_0122.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9809-16_0122.pdf).

### **Undang-undang dan Peraturan lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah